

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa;

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga telah menguraikan mengenai fungsi serta tujuan dari suatu pendidikan yang menyatakan bahwa;

Pendidikan nasional berfungsi ... membentuk watak serta peradaban bangsa ... bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bunyi peraturan perundang-undangan di atas menyiratkan bahwa, pendidikan berperan penting dalam upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik pada semua aspek baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, hingga sikap/perilaku agar sesuai dengan standar norma yang berlaku di kehidupan masyarakat dan juga nilai-nilai Pancasila yang diperlukan bagi dirinya untuk dapat bertahan hidup di tengah perkembangan zaman serta diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi atas segala bentuk permasalahan baik pada diri pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan juga negara.

Selanjutnya, apabila merujuk pada bunyi pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di atas, pendidikan nasional pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi yang sangat mulia. Tujuan pendidikan tidak hanya berfokus dalam mengembangkan kemampuan intelektual/pengetahuan (*knowledge*) peserta didik saja, namun juga memiliki tujuan lain yaitu untuk mengembangkan watak dan juga karakter dari warga negara khususnya karakter pada peserta didik. Sehingga

dapat dikatakan bahwa pendidikan nasional berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang baik/ideal khususnya karakter atau budi pekerti pada diri peserta didik.

Tujuan dari suatu pendidikan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan serta mengembangkan potensi yang ada dalam diri peserta didik supaya menjadi insan/manusia yang cerdas, terampil, serta berbudi pekerti atau berwatak yang unggul. Socrates menyatakan bahwa, mewujudkan individu agar dapat menjadi manusia yang cerdas dan juga baik adalah tujuan yang mendasar dari suatu pendidikan. Plato dalam bukunya *Republic* juga mengungkapkan bahwa, tuntunan (pedoman) moral yang jelas sangat diperlukan supaya individu bisa mencapai kebenaran dan budi pekerti/perilaku yang baik dan dapat dilaksanakan dalam setiap kehidupannya. Selain Socrates dan Plato, Aristoteles juga menyatakan bahwa, pendidikan seharusnya diarahkan pada kebaikan atau nilai (*value*) dari individu (Komalasari & Saripudin, 2017, hlm. 14-15).

Pendidikan yang diarahkan untuk membentuk/menguatkan karakter peserta didik sangat perlu untuk dilaksanakan mengingat proses pendidikan di persekolahan pada pelaksanaannya seringkali menitikberatkan pada kemampuan pengetahuan saja dan kurang mengembangkan aspek afeksi/sikap. Pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat moral/karakter individu sangat penting untuk dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan krisis moral yang saat ini tengah dihadapi oleh peserta didik (Sukatin & Al-Faruq, 2020, hlm. 20).

Pendidikan Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat PKn memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya untuk membangun serta menumbuhkan karakter dan juga budi pekerti pada warga negara khususnya pada peserta didik. Hal ini dikarenakan PKn yang dilaksanakan baik dilingkungan persekolahan (Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah) maupun PKn yang dilaksanakan di masyarakat bertujuan untuk membangun individu/masyarakat supaya menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas namun juga memiliki karakter/budi pekerti yang unggul, yaitu individu yang memiliki tanggung jawab, sadar serta paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga di suatu negara

tersebut. Menurut Branson (1999, hlm. 7-8), tujuan/misi dari PKn adalah untuk mendorong anggota dari suatu negara untuk terlibat aktif dan juga memiliki tanggung jawab dalam berbagai urusan kemasyarakatan serta politik diberbagai tingkatan baik lokal maupun dalam skala nasional.

Sebagai salah satu bagian dari tujuan Pendidikan IPS, PKn menitikberatkan pada upaya dalam membangun warga negara supaya bisa menjadi warga negara yang unggul serta memiliki kemauan untuk rela berkorban pada tanah airnya (Somantri, 2001, hlm. 159). Menurut Wahab & Sapriya (2011, hlm. 311-312), warga negara dapat dikatakan sebagai warga negara yang ideal dan unggul jika warga negara tersebut memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya dalam masyarakat, menunjukkan kepedulian sosial, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah pribadi maupun masalah sosial secara bijaksana sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya (menunjukkan kepekaan sosial, bertanggung jawab secara sosial, dan kecerdasan sosial), menunjukkan disiplin pribadi, serta mampu untuk berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif untuk mencapai kualitas diri pribadi serta karakter warga negara serta masyarakat yang baik.

PKn juga berperan besar dalam membentuk kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap warga negara dalam menghadapi berbagai tantangan terutama di era kemajuan teknologi seperti saat ini. Kompetensi yang dimaksud meliputi; pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), serta watak/karakter (*disposition*) dari warga negara. Salah satu kompetensi yang penting untuk dimiliki oleh setiap warga negara adalah watak/karakter warga negara (*civic disposition*). Hal ini dikarenakan watak dan juga karakter warga negara merupakan bagian dari elemen/unsur penting yang idealnya perlu dimiliki oleh setiap anggota suatu negara selain keterampilan dan juga pengetahuan (Cogan & Derricott, 2000, hlm. 2). Sehingga penguatan dan peningkatan watak/karakter dari suatu warga negara (*civic disposition*) khususnya bagi peserta didik melalui proses pendidikan perlu untuk dilakukan agar warga negara memiliki watak dan karakter kewarganegaraan, baik karakter publik dan juga karakter privat yang berguna

dalam menjaga serta memajukan demokrasi konstitusional (Branson, 1999, hlm. 23).

Pernyataan Branson tersebut dapat dimaknai bahwa karakter warga negara (*civic disposition*) akan mempengaruhi tegaknya demokrasi konstitusional bagi suatu negara. Demokrasi merupakan pemerintahan oleh rakyat. sehingga secara tidak langsung rakyat atau warga negara juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk suatu kehidupannya sendiri. Oleh karena itu maknanya seharusnya warga negara juga perlu memiliki sebuah sikap yang berbudi untuk membangun serta memperkuat tegaknya sistem demokrasi pada negara tersebut (Lickona, 2019, hlm. 8).

Selanjutnya, pembentukan dan pembangunan watak/karakter bagi warga negara juga sangat diperlukan dalam memelihara serta mempertahankan keberadaan (eksistensi) sebagai suatu bangsa dan negara (Mulyono, 2017, hlm. 218). Lebih lanjut Mulyono (2017, hlm. 219) juga mengungkapkan bahwa, dampak negatif dalam kehidupan berbangsa serta bernegara akan timbul apabila warga negaranya kehilangan karakternya. Warga negara akan menjadi pribadi yang egois dan fundamentalis sehingga akan memunculkan aksi kriminal.

Rusaknya karakter dan moral warga negara juga akan membuat bangsa dan negara menjadi hancur. Berdasarkan catatan sejarah, lemahnya ekonomi, militer, dan atau bencana alam bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan hancurnya suatu bangsa dan juga negara, akan tetapi lebih kepada rusaknya moral dan karakter dari bangsanya sendiri (Fathurrohman, dkk., 2013, hlm. 2). Kesejahteraan masyarakat dari suatu negara juga dipengaruhi oleh karakter dari warga negara itu sendiri. Maknanya, karakter dari warga negara akan turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi bangsa dan juga negaranya. Semakin baik akhlak atau karakter dari warga negaranya, maka semakin sejahtera negara tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang filsuf Yunani Heraclitus (dalam Lickona, 2012, hlm. 12) yang menyebutkan bahwa, karakter merupakan suatu takdir, takdir seseorang dapat terbentuk karena karakter yang dimiliki oleh orang tersebut, takdir tersebut juga turut menjadi takdir bagi seluruh masyarakat yang

ada di sekitarnya. Bahkan, kesejahteraan suatu bangsa dan negara juga ditentukan oleh karakter dari warga negaranya.

Karakter warga negara juga akan turut mempengaruhi kondisi masa depan suatu bangsa tersebut. Masa depan suatu negara akan baik apabila warga di suatu negara tersebut juga memiliki moralitas dan juga karakter yang bagus. Sebaliknya, apabila karakter atau watak warga negara buruk maka akan buruk juga kehidupan dari negara tersebut (Cahyani & Dewi, 2021, hlm. 270). Selain itu tanpa adanya nilai-nilai moral serta kebaikan yang dapat membentuk karakter yang baik, seseorang/individu tidak akan dapat mencapai kebahagiaan dalam hidupnya, serta aktivitas masyarakat tidak akan dapat berfungsi dan berjalan secara baik juga. Tanpa karakter yang baik, perkembangan seluruh umat manusia di dunia yang menuju pada penghormatan harkat dan martabat serta nilai-nilai dari setiap individu juga tidak akan dapat tercapai (Lickona, 2012, hlm. 22).

Pentingnya penguatan dan juga pembangunan karakter bagi warga negara juga akan turut mempengaruhi kemajuan suatu negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Ir. Soekarno (dalam Samani & Hariyanto, 2012, hlm. 1-2) yang menyebutkan bahwa, dalam membangun suatu bangsa, maka pembangunan karakter harus menjadi prioritas yang utama. Hal ini dikarenakan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang hebat dan juga bermartabat maka penguatan dan pembangunan karakter bangsa mutlak untuk dilakukan. Namun jika pembangunan karakter tersebut diabaikan, maka Indonesia akan terjerumus menjadi bangsa yang kurang berkualitas (bangsa kuli).

Karakter warga negara juga akan turut mempengaruhi baik buruknya penegakan hukum di suatu negara. Semakin baik karakter atau watak dari warga negara pada suatu negara, maka penegakan hukum di negara tersebut juga akan baik, namun sebaliknya, semakin hilang watak atau karakter warga negara di suatu negara maka semakin lemah juga penegakan hukum di negara tersebut. Hal itu diungkapkan oleh seorang hakim yang bernama Learned Hand (dalam Branson, 1999, hlm. 26) yang menyebutkan bahwa, suatu kebebasan letaknya berada dalam hati masing-masing individu/manusia serta tidak memandang jenis

kelamin (pria ataupun wanita). Apabila kebebasan itu hilang, maka konstitusi, hukum, serta pengadilan tidak mampu untuk melindunginya serta tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Sebaliknya, jika kebebasan tersebut masih ada maka konstitusi, hukum, dan pengadilan tidak dibutuhkan lagi untuk menjaganya.

Pembentukan dan juga penguatan karakter bagi warga negara dapat dilaksanakan melalui berbagai satuan pendidikan baik satuan pendidikan formal, informal, serta satuan pendidikan non formal. Pada satuan pendidikan formal (lingkungan persekolahan), pembentukan dan juga penguatan karakter bagi warga negara ditujukan siswa/peserta didik melalui pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan juga kokurikuler. Pembentukan dan juga penumbuhan karakter bagi peserta didik di lingkungan persekolahan tersebut bertujuan supaya pelajar/peserta didik agar memiliki sikap ataupun berkarakter sesuai dengan aturan serta standar moral yang berlaku di masyarakat dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila yang harus selalu melekat pada diri peserta didik sehingga akan terwujud pelajar Indonesia yang sejati.

Dengan demikian, kurikulum yang berorientasi pada pembentukan dan pengembangan karakter perlu diterapkan pada satuan pendidikan formal untuk mewujudkan generasi penerus bangsa (pelajar Indonesia) yang berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip pengembangan karakter. Selain itu, Kurikulum Merdeka juga memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.

Apabila merujuk pada peraturan menteri di atas, maka Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum yang berlaku saat ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan

pelajar Indonesia yang ideal dimana pelajar Indonesia yang ideal merupakan pelajar sepanjang hayat yang tidak hanya memiliki kemampuan intelektual dan keterampilan tertentu saja, namun juga pelajar yang senantiasa berperilaku dan juga bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam falsafah negara (Pancasila). Pelajar Indonesia senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku, menghormati hak orang lain serta menghindari perbuatan yang tidak patuh terhadap aturan (Izzati & Novitasari, 2023, hlm. 4). Pelajar Indonesia idealnya merupakan pelajar yang mampu menguasai berbagai kompetensi dan juga watak yang dibutuhkan untuk dirinya, masyarakat, serta bangsa dan juga negara sehingga akan tercipta pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Salah satu karakteristik dari Kurikulum Merdeka adalah adanya pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang selanjutnya disingkat dengan P5. Merujuk pada lampiran Permendikbud RI Nomor 12 Tahun 2024, P5 merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan/atau merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi peserta didik serta bertujuan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan suatu kumpulan kompetensi dan juga karakter yang idealnya perlu dan harus dimiliki oleh setiap pelajar di Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila.

Pelajar Indonesia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila akan senantiasa menunjukkan sikap beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Pelajar Pancasila akan senantiasa memahami serta melaksanakan ajaran agama dan juga kepercayaan yang dianutnya serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar Indonesia yang mencerminkan profil pelajar Pancasila juga memiliki sikap untuk mempertahankan kearifan lokal dan budaya luhur bangsanya, senantiasa terbuka

dalam berinteraksi dengan budaya lain, serta menghargai perbedaan tradisi serta budaya yang berkembang dalam masyarakat.

Pelajar Pancasila juga ditandai dengan kemampuan untuk melakukan kerja sama secara sukarela sehingga segala bentuk permasalahan serta persoalan dapat diselesaikan dengan mudah, lancar, dan juga ringan. Selain itu, pelajar Pancasila juga memiliki sikap untuk dapat bertanggung jawab atas segala proses dan juga hasil kerjanya. Pelajar Pancasila juga idealnya mampu untuk memproses berbagai informasi secara objektif, mampu menganalisis dan juga menilai informasi yang diterima serta mampu untuk menyimpulkannya dengan benar. Pelajar Pancasila juga seharusnya memiliki kemampuan untuk memodifikasi dan juga menciptakan sesuatu yang orisinal serta bermanfaat untuk bersama.

Namun, kenyataannya menurut peneliti hingga sekarang ini masih ditemukan peserta didik/pelajar yang bersikap abai serta mengesampingkan kewajibannya dalam mematuhi aturan-aturan baik yang ada dalam masyarakat maupun lingkup aturan negara serta tidak mencerminkan atau tidak menunjukkan perilaku atau watak warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah negara (Pancasila). Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus pelanggaran dan juga tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar yang diberitakan baik melalui media cetak, media sosial, maupun media elektronik. Kasus-kasus tindakan pelanggaran dan juga kejahatan yang diberitakan melalui berbagai media tersebut mengindikasikan bahwa pelajar Indonesia atau peserta didik tidak menunjukkan warga negara yang bertanggung jawab. Beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan karakter pelajar Indonesia yang bertanggung jawab itu meliputi perundungan (*bullying*), pembunuhan, tawuran, penggunaan obat-obatan terlarang (narkoba), serta perilaku tidak terpuji lain yang tidak mencerminkan pelajar Indonesia yang berkarakter. Perilaku-perilaku tersebut juga menggambarkan adanya degradasi moral/karakter pada warga negara khususnya pada peserta didik di Indonesia.

Degradasi moral dapat diartikan sebagai menurunnya/merosotnya nilai/moral/karakter yang berlaku dalam masyarakat (Sukardi, 2017, hlm. 309).



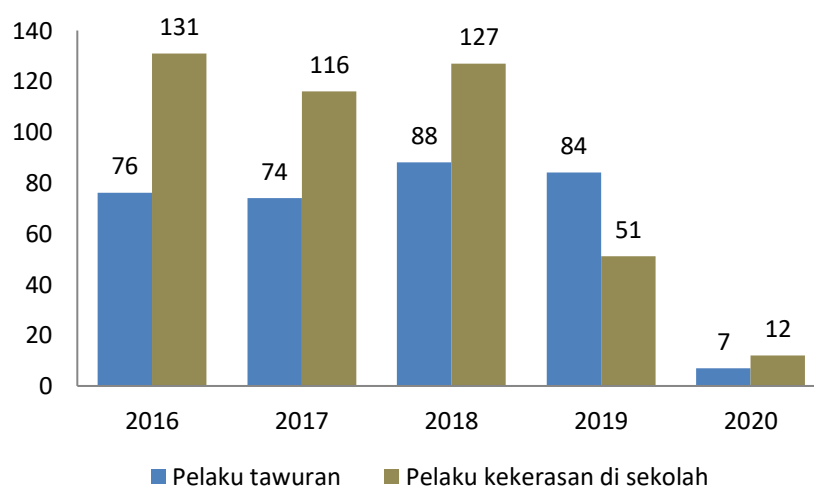
Degradasi moral juga dapat dimaknai dengan penurunan kesadaran dalam berperilaku sesuai dengan ketentuan norma-norma dalam masyarakat akibat kurangnya kesadaran dan juga ketaatan terhadap hukum yang berlaku baik dalam bentuk tertulis maupun nilai-nilai yang ada dalam hati nurani dan masyarakat itu sendiri (Ma'rufah, dkk., 2020, hlm. 193). Menurut Lickona (2019, hlm. 18-19) perilaku moral yang mengalami penurunan tersebut diakibatkan oleh pengaruh dan juga kebiasaan dari orang-orang disekitarnya yang melakukan perbuatan menyimpang, selain itu, sikap individualisme pada seseorang juga memberikan dampak terhadap penurunan moral.

Selain faktor kebiasaan dan juga individualisme, faktor lain yang turut memberikan dampak pada merosotnya/menurunnya karakter warga negara/peserta didik yang saat ini sedang terjadi adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi yang cukup pesat terutama dalam bidang komunikasi. Hal ini dikarenakan dengan pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan informasi-informasi dari dunia luar yang bersifat destruktif (negatif) mudah masuk dan tidak tersaring dengan baik. Akibatnya informasi terutama informasi yang buruk tersebut akan mempengaruhi perilaku seseorang khususnya peserta didik. Salah satu informasi yang masuk tersebut adalah konten pornografi yang dapat merusak mental bangsa. Menurut Kepala Pusat dan Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi menjelaskan bahwa, dalam satu menit, situs porno mampu menyediakan 30.000 konten pornografi. Meskipun telah diblokir namun situs-situs baru tersebut selalu saja muncul (Frieswaty, dkk., 2022, hlm. 43).

Lickona (2019, hlm. 20-30) menjelaskan bahwa, terdapat beberapa tanda-tanda atau gejala dari degradasi moral. Tanda-tanda tersebut sebagian besar telah terlihat atau telah terjadi dalam kehidupan warga negara khususnya pada peserta didik saat ini. Gejala-gejala penurunan moral menurut Lickona tersebut meliputi; 1.) melakukan tindakan anarki dan kekerasan. 2.) tidak menunjukkan sikap yang sportif dalam bertindak/melakukan kecurangan. 3.) melakukan pencurian. 4.) berani melanggar/megabaikan aturan yang berlaku. 5.) tawuran antar siswa. 6.) hilangnya perilaku/sikap untuk menghargai orang lain/ketidaktoleran. 7.)

melakukan sikap/tindakan yang mengarah pada perusakan diri. 8.) memiliki hasrat serta keinginan untuk melakukan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah baik secara hukum dan juga norma yang berlaku. 9.) Berkata atau bercakap dengan menggunakan bahasa kotor yang tidak pantas/patut untuk diucapkan. 10.) penyalahgunaan/mengonsumsi narkoba dan juga obat-obatan yang terlarang untuk dikonsumsi.

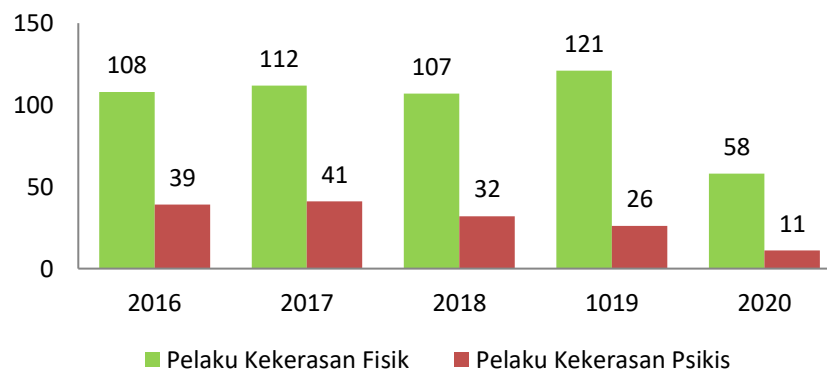
Salah satu contoh tanda degradasi moral yang sering diberitakan melalui berbagai media yaitu kasus tawuran dan juga kasus perundungan yang melibatkan peserta didik. Tawuran dan aksi perundungan (*bullying*) oleh pelajar merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan profil pelajar Pancasila dan sering ditemukan dalam dunia pendidikan. Tawuran dan *bullying* merupakan perilaku yang tidak menunjukkan pelajar Indonesia yang berkarakter. Selain dapat membahayakan dan merugikan diri sendiri, kedua perilaku tersebut juga dapat merugikan atau membahayakan orang lain (KPAI, 2021). Berdasarkan laporan dari pusat data dan informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pusdatin KPAI), pada periode 2016 – 2020 sebanyak 329 anak/pelajar terlibat aksi tawuran dan sebanyak 437 anak juga melakukan kekerasan di sekolah.



Gambar 1.1 Rincian Jumlah Anak sebagai Pelaku Tawuran dan Kekerasan di Sekolah Periode 2016-2020

(Sumber: <https://bankdata.kpai.go.id/>)

Selain aksi tawuran dan juga kekerasan (*bullying*) di sekolah, KPAI juga melaporkan bahwa selama periode dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terdapat sebanyak 655 anak melakukan kekerasan fisik maupun psikis. Rinciannya, sebanyak 506 anak terlibat dalam tindakan kekerasan fisik dan 149 anak lainnya melakukan kekerasan psikis (KPAI, 2021).

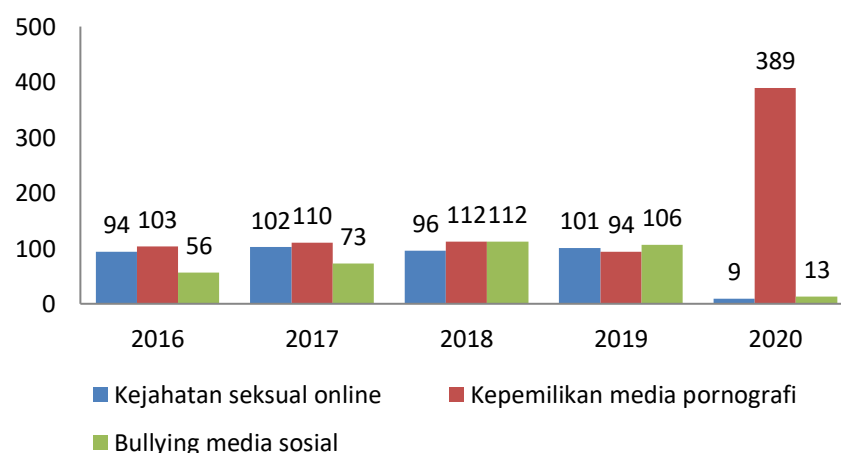


Gambar 1.2 Rincian Jumlah Anak Berhadapan Hukum sebagai Pelaku Kekerasan Fisik serta Pelaku Kekerasan Psikis Periode 2016-2020  
(Sumber: <https://bankdata.kpai.go.id/>)

Selain kekerasan fisik dan psikis, KPAI juga mempublikasikan jumlah anak berhadapan dengan hukum pada rentang periode 2016 hingga 2020 terkait dengan tindakan kejahatan lain seperti melakukan kekerasan seksual (pemeriksaan dan juga pencabulan) sebanyak 702 anak, sebanyak 11 anak melakukan tindakan sodomi/pedofilia, sebanyak 207 anak melakukan tindakan/aksi pembunuhan, sebanyak 252 anak melakukan perbuatan mencuri, sebanyak 37 anak melakukan aktivitas penculikan, serta sebanyak 12 anak terlibat dalam tindakan terorisme. Selanjutnya, pada tahun 2021 jumlah anak berhadapan pada hukum karena melakukan kejahatan/tindak kriminal mencapai 126 anak (KPAI, 2022). Sedangkan merujuk dari data yang dipublikasikan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri menyebutkan bahwa, pada periode Januari-Oktober 2022 kepolisian menangani sebanyak 472 terlapor kasus pembunuhan dan kejahatan yang menyangkut jiwa/nyawa, dari 472 terlapor tersebut sebanyak 20 orang diantaranya berstatus sebagai pelajar/mahasiswa (Polri, 2022c).

Selain itu, menurut data yang dikeluarkan oleh Pusiknas Polri, pada periode 2019-2022 sebanyak 679 anak atau 11,7% dari total seluruh terlapor terlibat dalam tindak kejahatan menggunakan senjata tajam (Polri, 2022b). Sedangkan pada periode 1 Januari-Juli 2023 terdapat 11.780 terlapor kasus kekerasan dan kejahatan. Dari 11.780 terlapor tersebut sebanyak 283 anak terlibat atau menjadi terlapor kasus kekerasan dan kejahatan dengan rincian jumlah pelaku dari anak laki-laki sebanyak 261 anak dan juga pelaku dari anak perempuan yaitu sejumlah 22 anak (Polri, 2023). Selain kasus kekerasan dan pembunuhan, aksi kriminal atau tindakan kejahatan lain berupa pencurian kendaraan bermotor juga turut melibatkan anak atau pelajar. Meninjau dari laman Pusiknas Polri, pada periode November 2022 terdapat sebanyak 189 orang dilaporkan atas tindakan kasus pencurian kendaraan bermotor dan 4% diantaranya merupakan pelajar/mahasiswa (Polri, 2022a).

Selain di dunia nyata, bentuk tindakan kriminal atau aksi kejahatan juga dilakukan oleh sejumlah pelajar/anak di dunia maya seperti kejahatan melalui media sosial. Berbagai tindak kejahatan yang dilakukan tersebut meliputi kejahatan seksual *online*, kepemilikan media pornografi, serta aksi *bullying* yang dilakukan melalui media sosial (KPAI, 2021). Berdasarkan data dari KPAI, pada periode 2016 – 2020 sebanyak 402 anak terlibat dalam kejahatan seksual *online*, sebanyak 808 anak terlibat dalam kepemilikan media pornografi, serta sebanyak 360 anak terlibat dalam aksi *bullying* melalui media massa.



Gambar 1.3 Jumlah Anak sebagai Pelaku Pornografi dan *Cybercrime*  
Periode 2016-2020

(Sumber: <https://bankdata.kpai.go.id/>)

Bulan September 2023 lalu, dunia pendidikan dihebohkan dengan kasus pembacokan yang dilakukan oleh salah seorang siswa terhadap gurunya di salah satu Madrasah Aliyah (MA) di Demak, Jawa Tengah. Mengutip dari laman DetikNews, siswa tersebut melakukan aksi kriminalnya karena tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Tengah Semester oleh guru yang bersangkutan. Hal itu dikarenakan siswa tersebut belum memenuhi syarat untuk dapat mengikuti UTS dengan tidak mengumpulkan tugas sesuai dengan batas akhir waktu yang telah ditentukan (Saifudin, 2023).

Selain kasus pembacokan siswa terhadap seorang guru, dunia pendidikan juga sempat dihebohkan dengan kasus *bullying* yang viral di media sosial dan menjadi perhatian publik pada Bulan September 2023 lalu. Kasus *bullying* tersebut dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya di salah satu SMP yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah. Mengutip dari laman CNN Indonesia, pelaku perundungan (*bullying*) melakukan pemukulan, menyeret, menginjak, dan menendang berkali-kali salah satu korban yang juga merupakan temannya hingga merinth kesakitan. Setelah kejadian yang viral tersebut, Polresta Cilacap menetapkan dua siswa SMP pelaku *bullying* tersebut sebagai tersangka atas kasus kekerasan (Indonesia, 2023).

Beberapa contoh kasus pelanggaran lain yang membuat gempar dunia pendidikan di Indonesia karena berkaitan dengan isu-isu karakter pada peserta didik/pelajar yang tidak mencerminkan pelajar Indonesia sebagai pelajar Pancasila disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1  
Contoh Beberapa Kasus Pelanggaran dan Kejahatan oleh Pelajar/Siswa yang  
Pernah Terjadi di Indonesia

No.	Jenis Kasus	Waktu & Tempat	Pelaku	Deskripsi Kasus
1.	Pembacokan dan pembunuhan.	10 Maret 2023	ASR/Tukul (pelajar)	Tukul membacok Aria Saputra (Siswa SMK Bina

Handi Kurniyawan, 2024

PENINGKATAN KOMPETENSI CIVIC DISPOSITION PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN PROJEK Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMK Syubbanul Wathon Tegalarjo Kabupaten Magelang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		Kota Bogor, Jawa Barat.		Warga) yang dilatarbelakangi oleh permasalahan lama antara sekolah korban dengan sekolah pelaku (Maulana, 2023).
2.	Pembunuhan	3 Mei 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara.	Enam orang, dua diantaranya pelajar.	Motif pembunuhan dilatarbelakangi oleh balas dendam antara pelaku kepada korban (Martinus, 2023).
3.	Penganiayaan	22 November 2022 di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.	Dua pelajar SMK berinisial IH dan VH.	Kedua pelajar SMK ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian karena melakukan penganiayaan terhadap seorang nenek dengan cara menendang dan memukul korban (Efendi, 2022).
4.	Tawuran dengan menggunakan senjata tajam.	9 Januari 2023 di Kota Tangerang, Banten.	Tiga orang pelajar.	Salah satu korban yang merupakan pelajar di SMK 10 Penerbang terluka akibat terkena bacokan dari pelaku. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian (Noviansah, 2023).
5.	Penyalahgunaan narkoba	13 Maret 2023 di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.	Tiga puluh delapan pelajar.	Puluhan pelajar dinyatakan positif narkoba setelah menjalani tes urine karena mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis yang dibeli melalui media sosial (Haryati, 2023).
6.	Penyalahgunaan narkoba	Selama kegiatan Operasi Tumpas Semeru 22 Agustus-2 September 2022 di Kota Malang, Jawa Timur	Sembilan belas orang, satu diantaranya seorang pelajar.	Seorang pelajar SMA yang terjaring Operasi Tumpas Semeru 2022 diamankan pihak kepolisian karena kedapatan mengedarkan pil dobel L ke pelajar lainnya (Midaada, 2022).
7.	Perundungan ( <i>bullying</i> )	18 November 2022 di Bandung, Jawa Barat.	Seorang pelajar di SMP Plus Baiturrahman, Bandung.	Salah seorang pelajar menendang kepala korban beberapa kali hingga jatuh pingsan dan tergeletak di lantai pada jam kegiatan

8.	Perundungan ( <i>bullying</i> )	31 Oktober 2022 di Cilincing, Jakarta Utara.	Empat pelajar SMK di Cilincing Jakarta Utara.	pembelajaran/jam sekolah (Hafidz, 2022). Empat pelajar SMK ditetapkan tersangka oleh kepolisian karena melakukan pemukulan dan penendangan terhadap korban saat sedang makan bersama di kantin sekolah (Indonesia, 2022).
----	------------------------------------	--	---	---

Sumber: Maulana (2023); Martinus (2023); Efendi (2022); Noviansah (2022); Haryati (2023); Midaada (2022); Hafidz (2022); Indonesia (2022).

Beberapa contoh kasus di atas sangat jelas bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh pelajar di Indonesia tersebut masih jauh dari profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu pembentukan serta peningkatan karakter khususnya yang berkaitan dengan kompetensi kewarganegaraan (*civic disposition*) pada peserta didik/pelajar perlu untuk dilakukan. Pada umumnya pembentukan serta peningkatan karakter pada peserta didik di lingkungan persekolahan untuk mewujudkan pelajar Indonesia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Sebagaimana hasil dari penelitian sebelumnya, dimana salah satu contoh pendekatan pembelajaran yang diterapkan untuk membentuk serta mengembangkan *civic disposition* melalui pendidikan kewarganegaraan adalah pendekatan berbasis nilai (*value based approach*). Pendekatan berbasis nilai mengimplementasikan berbagai macam model pembelajaran diantaranya seperti model klarifikasi nilai serta model nondirektif (Malatuny & Rahmat, 2017, hlm. 66).

Selain itu, guru Pendidikan Pancasila juga memiliki peran yang signifikan dalam membangun *civic disposition* peserta didik yaitu dengan melaksanakan proses pembelajaran serta membimbing peserta didik agar terbentuk suatu karakter dalam diri peserta didik tersebut melalui internalisasi serta implementasi nilai-nilai karakter dan juga melalui proses keteladanan yaitu dengan memberikan serta menunjukkan contoh perilaku yang baik dan juga positif selama pembelajaran Pendidikan Pancasila berlangsung di kelas. Guru Pendidikan Pancasila juga memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun karakter/watak dari peserta didik. Dalam upaya untuk membangun dan juga

menguatkan karakter pada peserta didik, guru Pendidikan Pancasila mendesain perencanaan pembelajaran yang mengarahkan pada penguatan karakter peserta didik terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Guru Pendidikan Pancasila juga menggunakan berbagai macam pendekatan, strategi, metode, dan juga sumber belajar tertentu yang dinilai bisa membangun dan juga memperkuat karakter pada siswa dalam mengajar (Heryani & Fadel, 2022; Pangalila, 2017; Putri, dkk., 2022).

Pembentukan karakter dari warga negara juga tidak hanya dilaksanakan melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila di kelas saja, namun juga dilakukan melalui program kegiatan pengabdian kepada masyarakat utamanya bagi pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan hasil riset, kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat meningkatkan kompetensi watak/karakter warga negara khususnya pemuda dari 30% menjadi 90% (Murtiningsih, dkk., 2022, hlm. 29). Selain kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, penguatan watak/karakter warga negara juga dapat dilaksanakan melalui pembiasaan dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di dalam kelas, pembiasaan atau habituasi dan kegiatan ekstrakurikuler juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam upaya meningkatkan watak/karakter warga negara (*civic disposition*) utamanya peserta didik (Susanto & Komalasari, 2015, hlm. 83).

Oleh karena itu, signifikansi serta kebaruan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan tersebut yaitu berusaha untuk meneliti tentang pembentukan dan peningkatan karakter/watak dari warga negara (*civic disposition*) melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaan, hingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat, maka pada penelitian ini berusaha untuk mengkaji tentang pembentukan dan peningkatan karakter khususnya karakter yang menjadi bagian dari kajian Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yaitu kompetensi kewarganegaraan *civic disposition* pada peserta didik melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau yang selanjutnya disingkat dengan P5.



Tidak dipungkiri bahwa terdapat beberapa penelitian sejenis yang sebelumnya telah dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan P5 di sekolah sebagai upaya dalam pembentukan karakter pada peserta didik di sekolah. Hal tersebut dikarenakan P5 sendiri merupakan pembelajaran berbasis proyek yang dilaksanakan dengan bertujuan untuk mengembangkan beragam kompetensi umum dan juga karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila bagi peserta didik.

Penelitian studi kepustakaan mengenai penanaman pendidikan karakter pada Kurikulum Merdeka melalui P5 menyebutkan bahwa, tujuan dari P5 yaitu untuk menguatkan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga akan terwujud kualitas sumber daya manusia yang unggul (Rofiqi, 2023, hlm. 172). Sedangkan penelitian studi literatur yang lain juga mengungkapkan bahwa, P5 sebagai bagian dari struktur Kurikulum Merdeka dinilai lebih efektif dalam upaya penanaman karakter peserta didik dibandingkan pada kurikulum sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya kebijakan alokasi jam pelajaran yang lebih banyak yaitu 20% - 30% untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk pengembangan karakter peserta didik (Hamzah, dkk., 2022, hlm. 558). Selanjutnya, penelitian studi literatur yang lain menyatakan bahwa, tujuan dari pelaksanaan P5 yaitu untuk mengembangkan serta menguatkan pendidikan karakter dalam rangka melahirkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila (Safitri, dkk., 2022, hlm. 7085).

Selain itu, beberapa penelitian sebelumnya juga mengungkapkan bahwa P5 memberikan dampak terhadap pengembangan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Sebagai contoh pelaksanaan P5 di SMA N 2 Tanggul yang dinilai dapat menumbuhkan dimensi profil pelajar Pancasila berupa kemandirian, bernalar kritis, serta kreatif pada peserta didik (Muttaqin, 2023, hlm. 40-41). Pelaksanaan P5 di SMA Perintis 2 Bandar Lampung juga berpengaruh terhadap sikap kemandirian pada peserta didik dengan signifikansi mencapai 70% dimana sikap kemandirian merupakan bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila (Fajriansyah, dkk., 2023, hlm. 1573-1574). Pelaksanaan P5 di SMP N 1 Kota Serang juga dinilai dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila pada

peserta didik. Bahkan pelaksanaan proyek ini mampu membentuk kesemua dimensi profil yang sebelumnya hanya difokuskan pada dimensi gotong royong dan kemandirian saja (Indriani, dkk., 2023, hlm. 401-402). Sedangkan pelaksanaan P5 di SMK Cendikia Bangsa mampu memberikan dampak pada penguatan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, serta kreatif (Ulandari & Dwi, 2023, hlm. 129).

Dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini adalah mengkaji serta mengaitkan pelaksanaan P5 di sekolah dengan karakter khusus dalam kompetensi kewarganegaraan yaitu *civic disposition* dimana karakter ini terbagi atas dua karakter yaitu karakter privat maupun karakter publik. Apabila penelitian sebelumnya hanya mengkaji pelaksanaan P5 dalam membangun karakter peserta didik secara konseptual berdasarkan kajian literatur (studi kepustakaan), maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji implementasi P5 dalam membangun karakter peserta didik secara konkret berdasarkan realitas hasil penelitian di lapangan (sekolah). Selanjutnya, penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji pelaksanaan P5 dalam membangun karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri atas enam profil pelajar Pancasila. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi P5 di sekolah dalam meningkatkan karakter khusus yang merupakan salah satu bagian dari kompetensi kewarganegaraan yang menjadi kajian khusus dari pendidikan kewarganegaraan yaitu *civic disposition*.

Secara garis besar, terdapat dua kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya. Pertama, apabila penelitian sebelumnya sebagian besar mengkaji peningkatan kompetensi *civic disposition* melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila, habituasi, kegiatan ekstrakurikuler, serta pengabdian kepada masyarakat, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji peningkatan kompetensi *civic disposition* melalui kegiatan P5 di sekolah. Kedua, apabila penelitian sebelumnya sebagian besar mengkaji tentang pelaksanaan P5 dalam upaya untuk membentuk dimensi karakter profil pelajar Pancasila yang

ditetapkan oleh Kemendikbud, maka penelitian ini berusaha untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan P5 dalam upaya meningkatkan karakter *civic disposition* peserta didik yang menjadi bagian dari kajian pendidikan kewarganegaraan. Selain kedua signifikansi utama di atas, signifikansi ataupun kebaruan lain dari penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya dapat dilihat dari perbedaan lokasi penelitian, subjek/partisipan penelitian, fokus penelitian, hingga metode penelitian yang digunakan.

SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang atau yang familiar disebut dengan SMK SW Tegalrejo merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang didirikan/dibangun oleh Yayasan Syubbanul Wathon yang terintegrasi dengan Pesantren API ASRI Tegalrejo Magelang. Sebagai sekolah yang terintegrasi dengan pesantren, pendidikan yang diselenggarakan di sekolah ini tidak hanya menekankan pada aspek penguasaan ilmu agama serta ilmu umum (sains/sosium) saja, namun juga diselenggarakan untuk membentuk akhlak/karakter yang unggul pada peserta didik/santri. Hal ini dikarenakan fungsi dan perhatian utama pesantren adalah untuk mempersiapkan santri agar dapat menggali dan memahami ilmu Agama Islam, serta juga berperan dalam mencetak calon ulama dan turut serta dalam penyiaran dakwah, selain itu pesantren juga berperan sebagai pertahanan akhlak bagi umat (Idris, 2013, hlm. 101).

Dalam melaksanakan setiap kegiatannya (khususnya kegiatan pembelajaran), para peserta didik dituntut untuk selalu menerapkan budaya kepesantrenan yang terkenal dengan *mottonya* yaitu “SANTRI” atau Santun, Kreatif, Mandiri, dan Berprestasi. Nilai-nilai kepesantrenan yang diterapkan di sekolah ini bertujuan dalam rangka mendidik para santri agar menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, mandiri, dan cerdas. Nilai-nilai tersebut harus selalu dipraktekkan dalam keseharian para santri baik di lingkungan sekolah dan juga pondok pesantren. Budaya kepesantrenan yang melekat pada diri santri bertujuan untuk membentuk pribadi yang unggul, baik dalam aspek keilmuan maupun karakter. Hal ini bertujuan untuk mencapai harapan dan keinginan orang tua yang

memilih memasukkan anak mereka ke pesantren dan SMK SW Tegalrejo (Syarif & Soeharto, 2017, hlm. 389).

Mengutip laman resmi Syubbanul Wathon, SMK SW Tegalrejo memiliki visi yaitu “Unggul dalam mutu, berdaya saing dalam teknologi, berwawasan global serta berakhlak Mulia”. Melalui visi tersebut maka misi yang diterapkan oleh sekolah untuk dapat mencapai visi tersebut diantaranya yaitu dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas serta dengan mewujudkan sumber daya manusia yang berwawasan agama agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. SMK SW Tegalrejo sebagai sekolah menengah kejuruan tidak hanya dituntut untuk membangun/meningkatkan keterampilan teknis atau *hard skills* yang khusus saja namun juga dituntut untuk meningkatkan keterampilan interpersonal atau *soft skills* yaitu kemampuan yang esensial dan seharusnya dimiliki pada setiap bidang pekerjaan. Hal ini berarti setiap individu yang akan menekuni suatu profesi tertentu tidak hanya memerlukan kecakapan teknis yang terkait dengan profesi tersebut namun juga harus memiliki kecakapan non teknis yang terkait dengan kecakapan yang akan menjadi faktor penguat keberhasilan individu tersebut dalam menjalaninya (Rahayu & Nuryata, 2011, hlm. 1).

Beberapa perusahaan kini lebih mengutamakan kandidat pekerja dengan karakter atau kepribadian yang kuat (*soft skills*) meskipun keahlian teknisnya dinilai masih kurang. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan dari beberapa individu yang menganggap jika kemampuan interpersonal/sosial/*soft skills* memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan keberhasilan di tempat kerja dari pada kemampuan teknis atau *hard skills*. Sebagai sekolah yang berbasis vokasi dan kejuruan, SMK SW Tegalrejo memiliki peranan salah satunya untuk menyiapkan calon lulusannya (siswa/santri) untuk memasuki dunia kerja/industri. Dengan demikian, peserta didik yang akan memasuki dunia kerja tidak hanya dituntut untuk menguasai kecakapan teknis (*hard skills*) saja, namun juga perlu menguasai kecakapan non teknis (*soft skills*) dengan baik agar dapat mengembangkan dirinya serta profesionalitasnya.

Pada umumnya, kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja/industri terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek fisiologis, kemampuan teknis, dan juga kemampuan interpersonal (Suryanto, dkk., 2013, hlm. 108). Pada prinsipnya, *soft skills* adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang/individu yang bisa ditingkatkan secara optimal dan sangat penting/vital serta diperlukan untuk dapat menyelesaikan suatu tugas maupun pekerjaan tertentu (Muhmin, 2018, hlm. 334).

Menurut Copper (dalam Lie & Darmasetiawan, 2017, hlm. 1501), berdasarkan hasil penelitian, seseorang yang memiliki/mempunyai tingkat kemampuan interpersonal ataupun *soft skills* yang cukup tinggi, maka orang/individu tersebut secara otomatis juga bisa memotivasi dirinya sendiri dan juga orang lain dalam menggapai sesuatu yang lebih besar sesuai dengan yang ingin diwujudkan. Mereka (seseorang yang memiliki kemampuan interpersonal ataupun *soft skill* dengan tingkatan yang tinggi) cenderung lebih bisa menikmati karier yang sukses, membangun hubungan personal yang kuat, dan juga menikmati kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki keterampilan interpersonal yang kurang berkembang/rendah. Berdasarkan hasil penelitian dari Gusti (dalam Ayaturrahman & Rahayu, 2023, hlm. 169) menyatakan bahwa, kemampuan teknis ataupun *hard skills* tidak menjadi jaminan atas kesuksesan seseorang. *Hard skills* hanya menyumbang 20% pencapaian dari prestasi, sementara kemampuan kepribadian dan *soft skills* menyumbang presentase yang lebih besar terhadap pencapaian prestasi yaitu sebesar 80%.

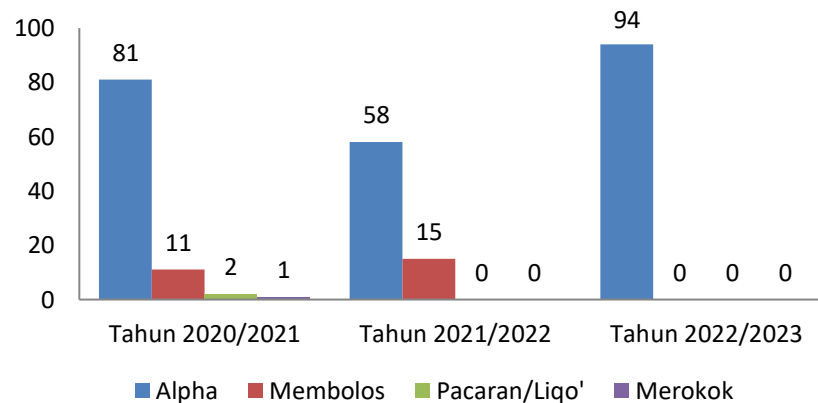
Sebagai sekolah berbasis pesantren serta berbasis kejuruan, SMK SW Tegalrejo Kabupaten Magelang juga tidak luput dengan beberapa permasalahan/pelanggaran oleh peserta didik pada sekolah tersebut. Permasalahan tersebut berupa pelanggaran-pelanggaran baik yang sifatnya ringan hingga sedang bahkan berat. Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kompetensi *civic disposition* serta *soft skills* pada peserta didik tersebut rendah. Pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh sebagian peserta didik berupa *alpha* (tidak datang ke sekolah tanpa keterangan) serta membolos ditengah jam KBM (jam kegiatan pembelajaran). Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut tidak

mencerminkan karakter sebagai warga negara yang bertanggung jawab karena telah mengabaikan kewajiban untuk mematuhi aturan-aturan khususnya yang berlaku di sekolah.

Berdasarkan data laporan yang didapatkan peneliti melalui informan bernama Ibu Siti Khaizul Mustaqimah selaku staf kesiswaan di SMK SW Tegalrejo menyatakan bahwa pada tahun ajaran 2020/2021 pada periode 31 Juli 2020-3 Juli 2021 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sebanyak 95 kasus dengan rincian berupa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa berupa *alpha* (tidak hadir tanpa keterangan) sebanyak 81 kasus bahkan terdapat peserta didik yang melakukan pelanggaran berupa *alpha* sebanyak 13 kali, merokok 1 kasus, melakukan interaksi dengan lawan jenis (berdua-duaan) secara bersembunyi-sembunyi (*liqo'*) sebanyak 2 kasus, serta membolos pada jam kegiatan pembelajaran sekolah sebanyak 11 kali baik yang dilakukan oleh peserta didik pada kelas X, XI, dan juga kelas XII.

Sedangkan pada tahun ajaran 2021/2022 dalam rentang waktu antara 30 September 2021 sampai 6 Februari 2022 telah terjadi total pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sebanyak 73 kasus dengan rincian berupa pelanggaran *alpha* sebanyak 58 kasus dengan jumlah *alpha* terbanyak adalah 15 kali, serta membolos pada jam KBM sebanyak 15 kasus dengan jumlah membolos terbanyak adalah 6 kali baik yang dilakukan oleh peserta didik pada semua tingkatan kelas, hingga pada tahun ajaran 2022/2023 telah terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa hanya berupa *alpha* sebanyak 94 kasus baik yang dilakukan oleh peserta didik di semua tingkatan kelas.

Secara ringkas jenis kasus pelanggaran serta jumlah kasus pelanggaran yang melibatkan peserta didik di SMK SW Tegalrejo disajikan melalui diagram pada gambar 1.4.



Gambar 1.4 Laporan Jumlah Kasus Pelanggaran Peserta Didik di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang pada Tahun Ajaran 2020/2021-2022/2023

(Sumber: Data kesiswaan SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo)

Pada tahun 2021 SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo ditunjuk sebagai salah satu SMK Pusat Keunggulan (*Centre of Excellence*) oleh Kemendikbud Ristek di Indonesia dan telah menerapkan kurikulum Merdeka sebagai bagian dari pembelajaran paradigma baru. Sebagai sekolah yang menyelenggarakan kurikulum Merdeka, SMK SW Tegalrejo menyelenggarakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 sebagai wujud pelaksanaan dari kurikulum Merdeka tersebut. Hal ini dikarenakan kegiatan P5 merupakan bagian dari struktur dalam kurikulum Merdeka di samping pembelajaran intrakurikuler. P5 sendiri merupakan kegiatan berbasis proyek yang dilaksanakan guna mendukung serta memperkuat pencapaian watak/karakter pada peserta didik/santri agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

Apabila dicermati, tujuan dari pendidikan nasional, tujuan pelaksanaan kegiatan P5, visi dan misi sekolah (SMK SW Tegalrejo), serta kompetensi *civic disposition* ataupun karakter warga negara memiliki keterhubungan. Oleh karena itu, berdasarkan konteks permasalahan yang telah diuraikan pada bagian di atas maka peneliti ingin mengetahui serta menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi dari kegiatan P5 di SMK SW Tegalrejo serta bagaimana bentuk dari peningkatan kompetensi watak/karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) baik karakter privat dan karakter publik pada peserta didik melalui kegiatan P5 tersebut

Handi Kurniyawan, 2024

**PENINGKATAN KOMPETENSI CIVIC DISPOSITION PESERTA DIDIK MELALUI KEGIATAN PROJEK Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) DI SMK SYUBBANUL WATHON TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

sebagai upaya pencapaian karakter warga negara yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akan dijawab pada studi penelitian dengan judul “Peningkatan Kompetensi *Civic Disposition* Peserta Didik melalui Kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang”.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Merujuk pada paparan identifikasi masalah sebagaimana sudah diuraikan/dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan yang ditekankan untuk selanjutnya dikaji pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah *civic disposition* peserta didik melalui kegiatan P5.

*Civic disposition* peserta didik tersebut meliputi karakter privat dan juga karakter publik dari peserta didik. Sehingga untuk mempermudah proses penelitian, penulis mengidentifikasikan batasan/fokus masalah tersebut kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana peningkatan karakter privat pada diri peserta didik melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang dilaksanakan di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana peningkatan karakter publik pada peserta didik melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis peningkatan kompetensi *civic disposition* pada peserta didik melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**



Merujuk pada fokus permasalahan yang sudah disusun dalam bentuk rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan dari penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang
2. Untuk menganalisis peningkatan karakter privat pada diri peserta didik melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang dilaksanakan di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang.
3. Untuk menganalisis peningkatan karakter publik pada diri peserta didik melalui kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang dilaksanakan di SMK Syubbanul Wathon Tegalrejo Kabupaten Magelang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, peneliti/penulis berusaha untuk menelaah secara mendalam terkait dengan kegiatan P5 sebagai bagian dari struktur kurikulum yang ada pada kurikulum Merdeka dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi *civic disposition* pada peserta didik sehingga diharapkan dapat membentuk dan meningkatkan *smart and good citizen* pada peserta didik itu sendiri.

Oleh karena itu harapan dari penelitian ini adalah dapat memberikan berbagai manfaat baik dari segi teori, segi kebijakan, segi praktik, serta segi isu dan aksi kebijakan. Beberapa manfaat tersebut meliputi:

##### **1.4.1 Segi Teori**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan juga kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keilmuan PKn terutama yang berkaitan dengan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) khususnya pada dimensi *civic disposition*, peningkatan/penanaman karakter, serta Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila/P5 pada domain kurikuler. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang aktual terkait dengan keterhubungan antara P5 dengan peningkatan *civic disposition* pada warga negara khususnya peserta didik sehingga berbagai permasalahan dan isu-isu/permasalahan karakter yang saat ini terjadi pada peserta didik dapat dipecahkan.

Dimensi kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) khususnya dimensi karakter/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada peserta didik pada umumnya dapat ditumbuhkan melalui kegiatan pembelajaran PKn di ruang-ruang kelas (persekolahan). Pembelajaran PKn pada umumnya tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan pengetahuan terkait dengan hal ikhwal yang menyangkut tentang hubungan negara dan warga negara saja, namun juga memiliki peranan dalam mengembangkan dan menumbuhkan karakter pada peserta didik. Dengan demikian penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan alternatif lain terhadap peningkatan *civic disposition* yang tidak hanya dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn saja, namun juga melalui kegiatan P5 di sekolah.

#### **1.4.2 Segi Kebijakan**

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat dari segi kebijakan diantaranya:

a. Bagi Pemerintah

Memberikan gambaran maupun informasi mengenai implementasi P5 di sekolah sebagai bagian dari struktur Kurikulum Merdeka yang diarahkan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kompetensi *civic disposition* peserta didik yang harapannya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (profil pelajar Pancasila) bisa melekat pada peserta didik kapanpun dan juga dimanapun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah serta Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila.

b. Bagi sekolah

Sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah dalam upaya mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

### 1.4.3 Segi Praktik

Hasil dari studi/penelitian ini secara paraktis diharapkan dapat berkontribusi serta memberikan manfaat yang signifikan kepada berbagai pihak diantaranya;

a. Guru.

Sebagai bahan evaluasi bagi guru maupun fasilitator P5 dalam upaya mengembangkan kegiatan pembelajaran yang mampu memunculkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada peserta didik di kemudian hari. Selain itu penelitian ini juga memaparkan data dan fakta terkait dengan hasil penelitian yang kemudian dapat digunakan sebagai analisis dalam perencanaan serta evaluasi pelaksanaan P5 yang diimplementasikan di sekolah-sekolah. Sehingga P5 yang dilakukan di berbagai sekolah khususnya di SMK SW Tegalrejo Magelang lebih terfokus pada penanaman serta penumbuhan karakter pada peserta didik.

b. Peserta Didik.

Sebagai alternatif solusi dalam upaya membentuk dan juga mengembangkan karakter peserta didik selain melalui pembelajaran di kelas khususnya Pembelajaran Pendidikan Pancasila, namun juga melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek seperti P5 sehingga peserta didik tidak hanya dapat merasakan pembelajaran kontekstual secara langsung namun juga secara tidak langsung dapat menumbuhkan karakter pada diri peserta didik.

c. Orang tua.

Sebagai bahan rujukan informasi bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana watak kewarganegaraan (*civic disposition*) pada peserta didik melalui kegiatan P5 di SMK SW Tegalrejo. Memberikan gambaran solusi

serta langkah-langkah yang konkret dalam menerapkan/melaksanakan P5 sebagai wahana dalam memperkuat karakter warga negara (*civic disposition*) terkhusus pada peserta didik.

d. Masyarakat

Turut merasakan dampak serta kontribusi dari pelaksanaan P5 serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat salah satunya yaitu permasalahan degradasi moral yang sering kali menimbulkan keresahan dan juga kekacauan di lingkungan masyarakat. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembalikan dan juga menjawab keresahan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat.

e. Akademisi

Sebagai sumber referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis terutama yang berkaitan dengan pengembangan *civic disposition* melalui kegiatan pembelajaran tertentu atau sebagai sumber rujukan dalam mencari informasi yang terkait pengembangan *civic disposition* melalui kegiatan pembelajaran tertentu khususnya kegiatan P5.

#### 1.4.4 Segi Isu dan Aksi Sosial

Harapan dari hasil penelitian ini adalah bisa dijadikan solusi atas berbagai macam permasalahan/kasus serta isu-isu karakter yang hingga saat ini menimpa peserta didik atau pelajar. Sehingga isu-isu karakter yang menimpa peserta didik dapat ditekan atau diselesaikan. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi sekolah atau pihak pembuat kebijakan sebagai landasan atau referensi dalam menerapkan kurikulum atau kebijakan pembelajaran yang jelas dalam upaya mengarahkan peserta didik sehingga tertanam dalam diri peserta didik tersebut watak atau karakter kewarganegaraan baik privat maupun publik serta dapat tercipta peserta didik yang memiliki kualitas unggul dalam berbagai aspek antara lain pengetahuan, aspek keterampilan, serta dalam aspek sikap/karakter yang diharapkan oleh bangsa dan juga negara.

### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Tesis ini ditulis secara sistematis dan terstruktur dengan mengikuti pola atau teknik penulisan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Rektor UPI Nomor 7876/UN40/HK/2021 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2019. Tesis ini terdiri dari lima bab dimana masing-masing bab tersebut berturut-turut meliputi; 1.) Pendahuluan. 2.) Kajian pustaka. 3.) Metode penelitian. 4.) Temuan dan Pembahasan. 5.) Simpulan, implikasi, dan rekomendasi.

Bab I pendahuluan, pada bagian ini terbagi atas enam subbab diantaranya; latar belakang penelitian, batasan istilah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi tesis. Pada bagian ini berisi tentang uraian/penjelasan terkait dengan latar belakang yang melandasi peneliti untuk mengangkat topik serta judul penelitian terkait dengan peningkatan *civic disposition* melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila karena adanya *gap* antara apa yang seharusnya dilakukan oleh peserta didik dengan keadaan atau isu yang menimpa peserta didik akhir-akhir ini.

Bab II kajian pustaka, pada bagian kajian pustaka terbagi atas tujuh subbab. Bagian ini juga diuraikan dan dijelaskan terkait dengan konsep serta teori yang relevan dengan topik pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk dipergunakan dalam mengkaji hasil penelitian baik yang bersumber pada buku teks, hasil penelitian dari artikel jurnal ilmiah, maupun berangkat dari hasil-hasil penelitian dari beberapa peneliti yang sebelumnya. Hasil telaah yang dimaksud meliputi; kompetensi kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan, watak/karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), serta P5 sebagai pembelajaran lintas disiplin ilmu pada kurikulum Merdeka.

Bab III metode penelitian, bagian metode penelitian dijelaskan dan juga diuraikan terkait dengan desain penelitian serta alasan (rasionalitas) dalam pemilihan desain tersebut, partisipan dan lokasi penelitian. Pada bagian ini diuraikan juga mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan/dipakai pada penelitian, serta analisis data yang digunakan pada penelitian.

Bab IV temuan dan pembahasan, pada bagian ini memaparkan dua hal utama, yaitu temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, serta pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Bab V simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Pada bagian ini berisi/terdiri atas tiga subbab yaitu simpulan yang terbagi atas sub subbab simpulan umum dan simpulan khusus. Subbab implikasi terdiri atas sub subbab implikasi praktis dan teoritis, serta rekomendasi. Pada bagian simpulan menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut. Sedangkan implikasi dan rekomendasi yang berisi tentang saran penelitian yang melangkah satu tahap lebih baik dari penelitian yang telah dilakukan pada penelitian ini.